

**SKRIPSI**

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU**



**Oleh:**

**WINIA AULIA RAHMAN**

**175310599**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : WINIA AULIA RAHMAN  
NPM : 175310599  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 30 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Desember 2021  
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 15 JULI 2021

Yang memberi pernyataan,

**WINIA AULIA RAHMAN**

**175310599**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan menggunakan metode *Value for money*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer ialah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada Rasio Ekonomis tahun 2017-2019 sudah baik, tetapi hasil dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitasnya belum dapat dikatakan sebagai kinerja yang efisien serta belum efektif.

Kata Kunci : *Value for money*, kinerja keuangan



## ABSTRACT

This research was conducted at the Department of Energy and Mineral Resources of Riau Province. The purpose of this study is to determine the financial performance of the Riau Province Energy and Mineral Resources Office in 2017 to 2019 using the *Value for money* method.

The type of research used is descriptive qualitative research. The types of data used in this study are Primary Data and Secondary Data. Primary Data is data obtained by conducting interviews with the Head of the Finance Department regarding the Performance Accountability Report of Government Agencies (LAKIP). Secondary data is data obtained from literature related to research.

The results of research conducted at the Energy and Mineral Resources Office of Riau Province show that the financial performance of the Riau Province Energy and Mineral Resources Office in the 2017-2019 Economic Ratio is good, but the results of the Efficiency Ratio and Effectiveness Ratio cannot be said to be performance, efficient and ineffective.

Keywords: *Value for money*, financial performance

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU**”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu **Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
3. Ibu **Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak** selaku Ketua Prodi Akuntansi SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA** selaku pembimbing telah banyak memberikan masukan, perhatian dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu **Dosen staff pengajar dan seluruh Karyawan Tata Usaha** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam memenuhi penelitian ini.
6. Terkhususnya terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtuaku tersayang yaitu papa (**Niamurrahman,S.Sos**) dan mama (**Dewi Aprianti**) serta adikku satu – satunya ( **Nasywa Fatika** ) selalu mendukung serta menjadi garda terdepan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk Rizky Ramadhan,S.Kom sebagai orang spesial yang telah berperan dalam mendukung serta memberikan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada sahabat dan teman yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun pelitian ini yaitu kepada rosa linda dan nabilla tyas .
9. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan.hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun, sehingga dapat menyempurnakan pengetahuan penulis.

Akhir kata, Alhamdulillahirobbil alamin semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Winia Aulia Rahman



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>9</b>
2.1 Telaah Pustaka .....	9
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan .....	9
2.1.2 Indikator Kinerja .....	10
2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja.....	11
2.1.4 Manfaat Penilaian Kinerja.....	11
2.1.5 Indikator Pengukuran Kinerja .....	12
2.1.6 <i>Value For Money</i> .....	13
2.1.7 Indikator <i>Value For Money</i> .....	15
2.1.8 Langkah-langkah Pengukuran <i>Value For Money</i> .....	16
2.1.9 Manfaat Implementasi <i>Value For Money</i> .....	18
2.1.10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ..	19
2.2 Penelitan Terdahulu .....	19
2.3. Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Desain Penelitian.....	24
3.1.1. Pendekatan Penelitian .....	24
3.2 Objek Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.3.1. Data Primer .....	25
3.4 Populasi dan sampel.....	25
3.4.1 Populasi .....	25
3.4.2 Sampel.....	26

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5.1 Dokumentasi.....	26
3.5.2 Studi kepustakaan.....	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	31
4.1.1. Sejarah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau .....	31
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	32
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.....	33
4.1.4 Stuktur Organisasi.....	35
4.2. Hasil Penelitian .....	37
4.2.1 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi.....	37
4.2.2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi.....	43
4.2.3. Rasio Efektivitas .....	51
4.3. Pembahasan.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1 Simpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019.....	4
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 2.2	: Kerangka Pemikiran .....	23
Tabel 4.1	:Rasio Ekonomis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2017-2019 .....	40
Tabel 4.2	:Rasio Efisiensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2017.....	45
Tabel 4.2.1	:Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2018 .....	47
Tabel 4.2.2	:Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2019 .....	48
Tabel 4.3	:Perhitungan Rasio Efektivitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2017 .....	53
Tabel 4.3.	:Perhitungan Rasio Efektivitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2018 .....	56
Tabel 4.3.2	:Perhitungan Rasio Efektivitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2019 .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan pada bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Pada umumnya organisasi sektor publik bisa dikatakan dengan baik apabila organisasi tersebut dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan mencapai tujuan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif (Khalikussabir, 2017).

Tetapi pada kenyataannya, organisasi sektor publik saat ini kerap sekali dikira oleh publik selaku suatu institusi yang kurang maksimal, kurang produktif, mutu kinerja yang rendah, serta sumber dari pemborosan dana. Perihal inilah yang menimbulkan terdapatnya suatu tuntutan dari publik yang menginginkan suatu sistem pemerintahan yang bersih. Pertumbuhan publik yang terus menjadi kritis ini pula menuntut terdapatnya akuntabilitas publik serta transparansi untuk organisasi sektor publik. Terdapatnya tuntutan dari publik ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar untuk reformasi kelembagaan dalam menghasilkan *good government*, ialah sesuatu pemerintahan yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.



Akuntabilitas publik pada biasanya bukan cuma hanya keahlian dalam menampilkan gimana uang publik bisa dipergunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, namun akuntabilitas publik pula berkaitan dengan sesuatu kewajiban dalam membagikan informasi dan pertanggungjawaban tentang apa yang sudah dibelanjakan serta yang lagi direncanakan oleh institusi pemerintah tersebut.

Akuntabilitas publik ini pula bisa berfungsi buat mengukur kinerja sesuatu institusi pemerintahan sehingga bisa diketahui sejauh mana kinerja pelayanan publik sudah dilaksanakan. Dalam rangka penerapan gunanya, institusi pemerintah sangat diharapkan buat bisa merancang strategi buat tingkatkan mutu serta kuantitas kinerjanya dalam penuhi kebutuhan publik. Oleh sebab itu pula dibutuhkan suatu perkakas ataupun prosedur guna mengukur sesuatu kinerja institusi pemerintah sehingga bisa diketahui sejauh mana kenaikan mutu kinerja sudah dilaksanakan.

Pengukuran kinerja yakni proses dalam memperkirakan suatu aktivitas apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sudah berhasil meraih sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja pada biasanya diawali dengan penetapan indikator dalam membagikan sesuatu informasi yang membolehkan organisasi sektor publik bisa memonitor kinerjanya dalam menciptakan suatu *output* serta *outcome* untuk publik. Pengukuran kinerja sangat berarti dalam memperkirakan akuntabilitas sesuatu organisasi dalam menciptakan kinerja yang maksimal (Isham Harindra dan Sapari : 2017). Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah dilakukan dengan metode membandingkan hasil yang sudah dicapai pada sesuatu periode dibanding dengan

periode sebelumnya sehingga bisa diketahui gimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang sudah terjadi.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud tertentu. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk bisa membantu organisasi untuk fokus kepada tujuan programnya. Hal ini pada nantinya bisa meningkatkan efesiensi dan efektifitas pada organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua ukuran dalam kinerja pada sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan sebuah keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki organisasi kelembagaan.

Salah satu cara dalam penilaian kinerja dapat digunakan dengan cara menggunakan konsep *value for money* yaitu melakukan pengukuran/ penilaian suatu kinerja dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, serta rasio efektifitas apakah pada program yang telah dirancang sudah termasuk dalam kategori yang ekonomis, efisien serta efektifitas. Jika diamati sebenarnya konsep *value for money* bukanlah sesuatu yang baru, bahkan *value for money* merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam anggaran kinerja yang tertata dengan baik. Menurut Mahmudi (2015) *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengatur dalam mengelola ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan bahwa inti pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Pengukuran Kinerja merupakan proses yang sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya menunjukkan kemampuan bahwa uang publik dibelanjakan tetapi juga menunjukkan kemampuan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomi, efektif dan efisien.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola dana APBD. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Sebagai Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Riau c.q Sekretaris Daerah Provinsi Riau dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Tabel I.I**

**Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019**

NO	PROGRAM	TAHUN (%)		
		2017	2018	2019
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86.38	42.43	84
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.84	67.1	94.98
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.57	38.09	85.08
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	79.98	82.07	88.61
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	78.96	53.42	86.1
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	94.01	28.11	91.2
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi	85.8	1.17	91.97
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas	88.42	49.46	83.38
9	Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral Batubara dan Energi	83.45	67	60.36

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau,2021

Pada tabel Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatas menjelaskan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau meliputi pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pada suatu instansi pemerintahan. Terlihat bahwa pada tahun 2017 dan 2019 Program pencapaian kinerja realisasi rata-rata diatas 70%. Namun terlihat pada tahun 2018 program pencapaian kinerja realisasinya rata-rata tidak mencapai 70%, akibat tidak adanya dianggarkan pada APBD di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi pada tahun 2018 memiliki realisasi terendah dikarenakan adanya kebijakan Pemerintahan Provinsi Riau untuk tidak melaksanakan kegiatan yang tidak di prioritaskan karena terjadinya defisit anggaran. Sehingga sebagian besar kegiatan pada program tersebut tidak dijalankan. Pada Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral Batubara dan Energi pada tahun 2018 memiliki realisasi terendah dikarenakan sebagian besar program pada tahun 2018 tidak dianggarkan pada APBD Pemeritah Provinsi Riau direnakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut.

Penulis tertarik melakukan penelitian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau karena pada hakikatnya Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi perhatian Pemerintah Provinsi karena memiliki tugas dalam penyenglanggaran otonomi daerah pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Data dan Informasi, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Minyak dan Gas.



Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengajukan penelitian ini dengan judul **Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah supaya mengetahui serta mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

2. Bagi Instansi Pemerintahan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan metode *Value For Money* pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sama ataupun sejenis, yang bisa digunakan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut atas materi yang sama, dan sehingga penelitian bisa dapat di sempurnakan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TELAAH TEORI DAN HIPOTESIS**

Pada bab ini membahas tentang telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian serta hasil hipotesis

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan

pengukuran variabel,dan metode analisis yang dilakukan untuk menarik kesimpulan

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran dari penelitian yang telah dibuat



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Telaah Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja ialah gambaran mengenai tingkat dari sebuah pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi dan misi organisasi yang terdapat pada strategik planning disuatu orgnisasi. Tingkat dari sebuah pencapaian pelaksanaan pada program didalam organsasi dibutuhkannya sistem pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja ialah instrument untuk menilai sebuah kesuksesan didalam organisasi. Dalam situasi organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi itu akan dipakai untuk mendapatkan legitimasi serta dukungan publik. Masyarakat akan menilai bagaimana keberhasilahan dari organisasi sektor publik melalui keterampilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah serta berkualitas.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Keuangan merupakan gambaran dari pencapaian sebuah kesuksesan sebuah misi dan visi yang tertuang didalam sebuah perencanaan strategi organisasi.



### 2.1.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), serta dampak.

- a. Indikator masukan (*Input*) ialah semua segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran(*output*). Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*output*) ialah sesuatu hasil yang langsung dari suatu proses. Pengukuran *output* ialah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran dari *output* dapat menunjukkan hasil dari sebuah implementasi suatu program atau dari aktivitas.
- c. Indikator dampak (*Outcome*) ialah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari pada *output*, karena *output* hanya mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan. Dapat dikatakan, *outcome* ialah hasil yang dicapai dari sebuah program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

### 2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja berdasarkan Mardiasmo (2002:122) yaitu untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik dalam mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara sama sehingga bisa dikontrol perkembangan pencapaian strategi, serta memberikan kesesuaian terhadap pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi dalam mencapai kesesuaian tujuan, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Sedangkan tujuan pengukuran oleh Mahmudi (2007:14) yaitu dapat memberikan pemahaman mengenai tingkat yang dicapai untuk tujuan organisasi. Penilaian kinerja memiliki kegunaan dari tonggak yang memaparkan bahwa tingkat ketercapaian tujuan serta apakah sebuah organisasi berjalan sesuai dengan aturan atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, mengoreksi kinerja periode yang akan datang sehingga pengukuran kinerja dapat digunakan untuk syarat pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

### 2.1.4 Manfaat Penilaian Kinerja

Manfaat dari penilaian kinerja ialah untuk menilai kinerja yang telah dicapai pada suatu periode tertentu dengan mencerminkan tingkat sebuah keberhasilan dari suatu pelaksanaan kegiatan, dimana selain digunakan untuk memperhatikan kinerja organisasi secara menyeluruh maka pengukuran kinerja ini juga dapat digunakan untuk menilai sebuah kontribusi dalam pencapaian sebuah tujuan secara menyeluruh, dapat juga digunakan sebagai dasar penunjukan dari strategi perusahaan dimasa mendatang, serta bisa dijadikannya sebagai dasar

penentuan kebijakan penanaman modal supaya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

### **2.1.5 Indikator Pengukuran Kinerja**

Menurut Hersey, dkk dalam Wibowo (2011:102) terdapat beberapa indikator kinerja:

a. Tujuan

Tujuan menunjukkan kemana arah kinerja harus dilakukan. Atas arahan tersebut, dilakukan kinerja dalam mencapai tujuan. Kinerja sebuah individu maupun organisasi dapat dikatakan dengan berhasil apabila telah dapat dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Standar

Standar ialah suatu ukuran dimana apakah tujuan yang diinginkan telah dapat tercapai. Tanpa adanya standar tidak dapat diketahui kapan sebuah tujuan akan tercapai. Kinerja seseorang dapat dikatakan dengan berhasil apabila telah bisa mencapai standar yang telah ditetapkan atau telah disepakati bersama dengan atasa atau bawahan.

c. Umpan Balik

Umpan balik merupakan sebuah masukan yang dipergunakan dalam mengukur kemajuan sebuah kinerja, standar dari kinerja, serta pencapaian tujuan. Dengan dilakukannya umpan balik evaluasi dalam kinerja sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan dalam kinerja.

d. Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan sebuah faktor yang menunjang dalam pencapaian sebuah tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas dari pekerjaan spesifik tidak bisa dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan dengan sebagaimana seharusnya.

e. Kompetensi

Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang untuk mewujudkan tugas nya yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

f. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong untuk seseorang dalam melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif dalam mencapai tujuan , kinerja tidak akan bisa berjalan.

g. Peluang

Pekerja perlu dalam mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan dari prestasi dalam pekerjaannya. Tugas dalam mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapatkan perhatian yang lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia.

### 2.1.6 Value For Money

Konsep *value for money* sangat berbeda dengan pengertian dari konsep *time value of money* dalam akuntansi dan manajemen keuangan. *Time value of money* memiliki pengertian bahwa nilai yang dapat berubah dengan adanya dari perubahan dari waktu, sedangkan *value for money* memiliki pengertian yaitu



penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini menjelaskan bahwa setiap rupiah harus dihargai secara seimbang dan digunakan sebaiknya-baiknya. *Value for money* yaitu sebuah konsep dari pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasari pada tiga elemen utama, yaitu:

1. Ekonomi merupakan perolehan input dengan kualitas serta kuantitas dengan harga yang terendah. Ekonomi berkaitan dengan sebuah pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder yang merupakan tenaga kerja, bahan, infrastruktur, serta barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Ekonomi berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros serta yang tidak produktif.
2. Efisiensi merupakan perolehan dari output yang maksimal pada input tertentu dengan penggunaan terendah untuk mencapai target, maka efisiensi perbandingan output/input. Output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan output tersebut.
3. Efektivitas ialah tingkat dari sebuah pencapaian dari hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar andil pada output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi

berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome atau hasil.

### **2.1.7 Indikator *Value For Money***

#### **2.1.7.1 Indikator Alokasi Biaya (Ekonomi dan Efisiensi)**

Ekonomi adalah tindakan pembelian produk dengan tingkat dan kualitas tertentu dengan biaya terbaik. Aspek keuangan memiliki kesepakatan bahwa aset input harus diperoleh dengan biaya lebih rendah yang mendekati biaya pasar. Masalah keuangan sering disebut sebagai sering disebut dengan kehematan yang mencakup pengelolaan dengan hati-hati atau cermat serta tidak ada pemborosan. Kegiatan fungsional dianggap bijaksana jika dapat menghapus atau mengurangi pengeluaran yang tidak berguna. Efisiensi adalah produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah mungkin. Suatu organisasi, program, dan kegiatan dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah mungkin, atau dengan input tertentu dapat menghasilkan output yang maksimal.

#### **2.1.7.2 Indikator Kualitas Pelayanan (Efektivitas)**

Efektifitas ialah sebuah proses dari kegiatan yang mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan telah dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

## 2.1.8 Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money*

### 2.1.8.1 Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi merupakan pengukuran yang mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran yang relatif. Pernyataan yang berhubungan dengan pengukuran ekonomi ialah:

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan oleh organisasi?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Pengukuran ekonomi membutuhkan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Untuk mencocokkan seberapa besar tingkat ekonomis suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Secara matematis, ekonomi merupakan tolak ukur antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input* tersebut. Berikut ini rumus untuk pengukuran tingkat ekonomi Nur Zeni (2020:28).

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Nur Zeni (2020:29) menyatakan bahwa *input* ialah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan untuk menghasilkan *output* tertentu. *Input* dapat berupa infrastruktur, kas, dan masukan lainnya. Pengertian nilai *input* ialah sejumlah dana yang diperkirakan akan keluar untuk memenuhi kepentingan dari organisasi.

### 2.1.8.2 Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan *input*. Apabila semakin besar *output* dibandingkan dengan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Secara sistematis, efisiensi ialah perbandingan antara output dengan input atau dengan bahasa lainnya output per input. Berikut ini rumus untuk pengukuran efisiensi menurut Mardiasmo (2018).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

*Output* ialah hasil, tujuan atau target yang akan dicapai dari suatu kegiatan atau program. Kariyoto (2017:79) menyatakan bahwa pengukuran *output* harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Ditujukan ke bidang kinerja yang sesungguhnya, yaitu berupa *output* yang benar – benar menunjukkan kinerja yang diharapkan.
2. Tepat sasaran, dapat diartikan bahwa tidak hanya mencerminkan estimasi kasar
3. Tepat waktu, objektif, dapat diartikan yaitu tidak dapat dimanipulasi

Jika dalam pengukuran *output* tidak memiliki salah satu dari karakteristik diatas, maka sistem pengendalian yang berorientasi pada *output* kemungkinan besar akan mengalami kegagalan.

### 2.1.8.3 Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas



hanya menilai apakah sebuah program/kegiatan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini rumus pengukuran efektivitas menurut Mardiasmo (2018)

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Karyoyo (2017:79) *outcome* adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* dikatakan lebih tinggi dari pada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan

### 2.1.9 Manfaat Implementasi *Value For Money*

Penerapan konsep *value for money* didalam pengukuran sebuah kinerja pada organisasi sektor publik tentunya bisa memberikan manfaat bagi sebuah organisasi itu sendiri ataupun bagi masyarakat. Manfaat yang dikehendaki didalam pelaksanaan *value for money* pada sebuah organisasi sektor publik ialah bernilai ekonomis, berdaya guna atau efisien serta efektif. Manfaat lain dari sebuah implementasi dari *value for money* menurut Mardiasmo (2004:7) ialah dapat meningkatkan efektivitas dalam sebuah pelayanan publik, yang dalam sebuah artian pelayanan yang nantinya diberikan bisa secara tepat dalam sasaran, meningkatkan sebuah mutu dari pelayanan publik, menurunkan sebuah biaya dari pelayanan publik, serta alokasi dalam berbelanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

### 2.1.10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mendefinisikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau kota, instansi pemerintah yang dimaksud ialah Satuan Kerja Pemerintah yang telah diberikan hak serta tanggung jawab dalam mengelola sendiri administrasi serta keuangannya. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasar pada siklus anggaran tahun yang sedang berjalan yaitu satu tahun.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Khalikussabir (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan <i>Value For Money</i> (studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo)	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Pada tahun 2014-2016 analisis <i>value for money</i> dari persepektif ekonomis pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya dan yang paling besar selama 3 tahun dibandingkan dengan Cipta Karya Pengairan, sedangkan Analisis <i>value for money</i> dari persepektif efektifitas pekerjaan, diperoleh bahwa Dinas PU yang

			<p>memiliki kinerja efektif hanya Cipta Karya selama tahun 2014-2015 namun tahun 2016 PU Bina Marga yang paling efektif dalam pekerjaannya, sedangkan Pengairan tidak ada yang efektif. Sedangkan Analisis value for money dari persepektif efisiensi, diperoleh bahwa Dinas PU masih didominasi oleh kinerja yang sangat efisien, dengan nilai yang sangat efisien pada tahun 2014 berada pada Pengairan, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 nilai efisiensi didominasi oleh Cipta Karya.</p>
<p><b>Indrayani, Khairunnisa (2018)</b></p>	<p>Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Value For Money sangat baik diterapkan pada DPKAD Kota Lhokseumawe karena dapat memberikan yang lebih terstruktur dan gambaran kinerja yang komprehensif</p>
<p><b>Irmawati, Rifka Rinaldy (2018)</b></p>	<p>Analisa Kinerja Keuangan Dengan</p>	<p>Metode deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p>

	Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan SUSOH Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015		kinerja keuangan pada Kecamatan susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015 ditinjau dari elemen ekonomi menunjukkan tidak adanya nilai ekonomis dikarenakan pagu anggaran terserap 100% dengan output yang tidak mencapai sempurna. Ditinjau dari elemen efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang semakin meningkat setiap tahunnya dengan selisih rata-rata dari tahun 2013-2014 sebesar 65%-70% untuk tahun 2015 mencapai 83,33% sehingga dikatakan cukup efisien. Dan ditinjau dari elemen efektifitas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya rata-rata antara tahun 2013-2014 sebesar 5%, dan untuk tahun 2014-2015 selisihnya sebesar 13,33% hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup efektif.
<b>Idah Sari Rahmawati, Nur Handayani (2019)</b>	Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah Daerah

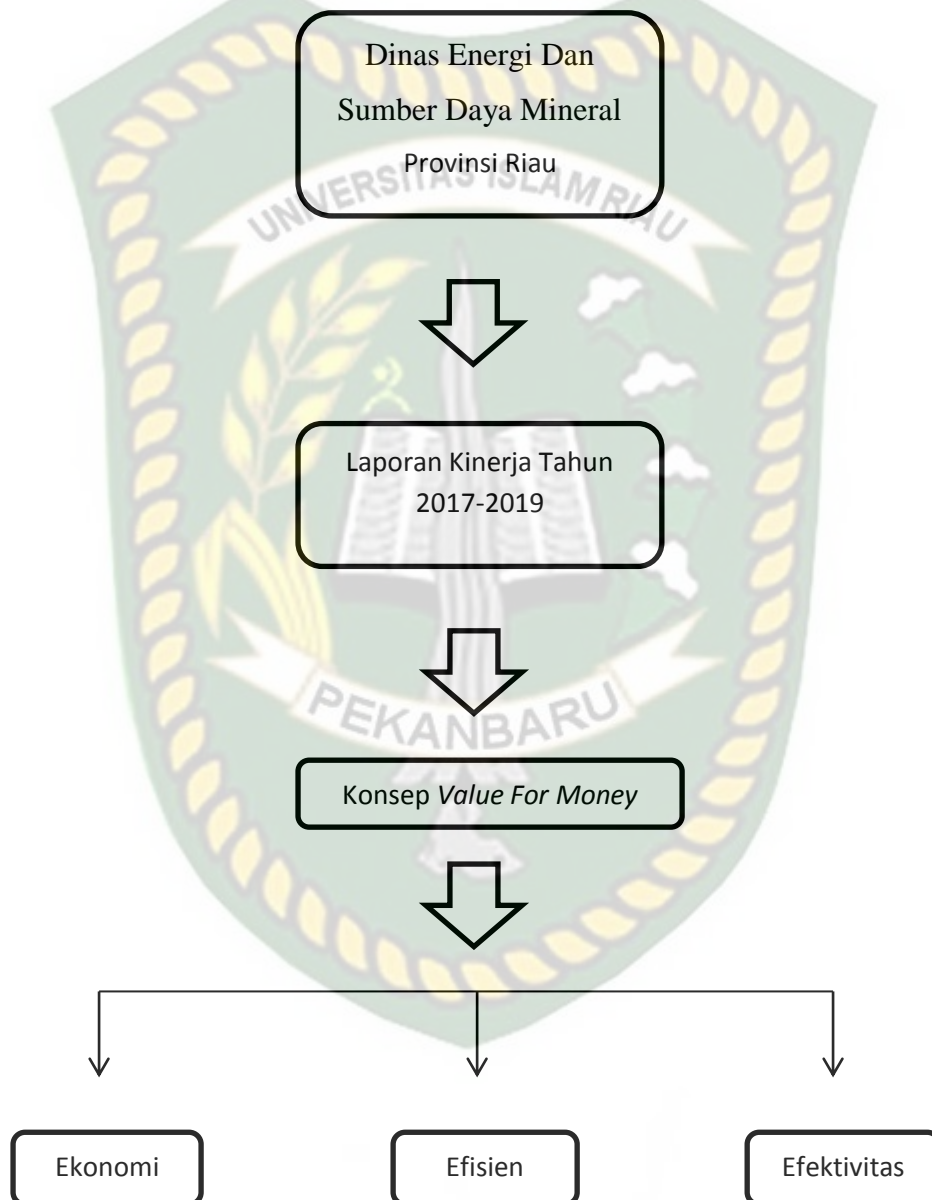


	Sidoarjo dengan menggunakan prinsip Value For Money		Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2014-2018 tercatat memiliki Rasio Ekonomis yang tidak stabil namun tetap ekonomis dengan rasio kurang dari 100%.
<b>Dika Husni Sanjaya, Maswar Patuh Priyadi (2019)</b>	Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Metode deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan pengukuran efektivitasnya sudah berhasil karena pemrosesannya mencapai tujuan dan sasaran dalam segi efisiensi sudah berhasil karena output dari kinerja dinas semakin meningkat,dalam segi ekonomis sudah berhasil dari realisasi anggaran yang lebih hemat.
<b>Isham Hariandra, Sapari (2019)</b>	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value For Money	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi kewajibannya dalam menyajikan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

### 2.3.Kerangka Pemikiran

Table 2.2

**Kerangka Berpikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

##### 3.1.1. Pendekatan Penelitian

Jenis studi yang digunakan merupakan studi kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah studi yang digunakan bertujuan dalam menguasai fenomena yang terpaut dengan apa yang dialami oleh objek studi, serta mendapatkan gambaran suatu data mengenai objek yang diteliti, seperti pola sikap, sesuatu anggapan terhadap objek, tindakan, serta lain sebagainya. Studi kualitatif ialah informasi yang diperoleh disusun sedemikian rupa setelah itu dianalisis bersumber pada teori-teori yang relevan dengan kasus untuk mengambil kesimpulan serta saran. Sebaliknya metode yang digunakan yakni metode deskriptif, metode deskriptif ialah metode yang menggambarkan serta mendeskripsikan beberapa variabel yang berkaitan dengan fenomena yang hendak diuji. Pada biasanya metode deskriptif ialah studi yang tidak perlu merumuskan suatu hipotesis.

Studi ini bertujuan buat mendeskripsikan keadaan dari kinerja keuangan Provinsi Riau bila dilihat ataupun dinilai dengan memakai *value for money* dengan mengumpulkan dan menyajikan informasi yang diterima dari Pemerintah Provinsi Riau berbentuk data-data jumlah anggaran pendapatan serta belanja daerah, realisasi pendapatan serta belanja daerah, realisasi pendapatan serta belanja daerah kota pekanbaru sehingga membagikan yang cukup jelas buat penulis menganalisis dan menyamakan dengan teori yang ada.

## 3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Objek penelitian ini adalah informasi dan data Pencapaian Realisasi Anggaran yang terdapat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

### 3.3.1. Data Primer

Data primer didalam penelitian ini ialah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan di dalam penelitian ini yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada periode tahun 2017,2018 dan 2019.

### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada informasi yang dikumpulkan dari sumber – sumber yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini ialah berupa jurnal, literature, skripsi, serta buku terdahulu yang berkaitan dengan penelitian analisis *Value For Money* pada pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang pada penelitian ini.

## 3.4 Populasi dan sampel

### 3.4.1 Populasi

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:61). Populasi



dalam penelitian ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2017 sampai dengan 2019

### **3.4.2 Sampel**

Sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara sampel berurutan dengan *observasi continue* yaitu mengadakan analisa terhadap laporan kinerja instansi pemerintahan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dari tahun ke tahun, sehingga diperoleh informasi yang cukup untuk menggambarkan kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Riau tahun 2017, 2018, dan 2019. Sampel didalam penelitian ini adalah laporan kinerja instansi pemerintahan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2017, 2018, dan 2019.

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dialokasi pada penelitian ini adalah:

### **3.5.1 Dokumentasi**

Metode dokumentasi ialah suatu tahap didalam mengumpulkan data dengan cara memfotocopy dokumen atau laporan kinerja instansi pemerintah yang diterima dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

### **3.5.2 Studi kepustakaan**

Data diperoleh melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian seperti; buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, undang-undang, peraturan pemerintah dan sumber data tertulis baik tercetak maupun elektronik.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis memakai metode deskriptif yaitu, menganalisa dan mengumpulkan data, yang kemudian disusun berdasarkan kelompoknya agar data-data tersebut bisa diteliti dengan berdasarkan teori yang relevan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dan kemudian akan memperoleh kesimpulan. Pada tahap pertama dari penelitian, dilakukannya pengumpulan data seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), lalu data diolah serta dihitung atau dianalisis dengan menggunakan indikator *Value for Money* untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Hasil dari perhitungan yang didapat kemudian di jabarkan kedalam bentuk kata untuk mendeskripsikan makna dari angka yang telah didapat dari hasil perhitungan tersebut.

Indikator *value for money* pada pengukuran kinerja organisasi sektor publik terdiri dari tiga yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Berikut cara menghitung dari ketiga indikator tersebut:

1. Rumus ekonomi menurut Nur Zeni (2020:28) sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Input* : Realisasi anggaran.

Merupakan realisasi anggaran pada program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi serta pada

program pengelolaan dan fasilitasi mineral batubara dan energi tahun 2017-2019.

Nilai Input : Anggaran

Merupakan anggaran pada program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi serta pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral batubara dan energi pada tahun 2017-2019

Kriteria ekonomi menurut Purwiyanti (2019:194) adalah:

- a. Apabila hasil yang diperoleh kurang dari 100% (<100%) maka dinyatakan sebagai ekonomis.
  - b. Apabila hasil yang diperoleh sama dengan 100% (=100%) maka dinyatakan sebagai ekonomis berimbang.
  - c. Apabila hasil yang diperoleh lebih dari 100% (>100%) maka dinyatakan sebagai tidak ekonomis.
2. Rumus efisiensi menurut Mardiasmo (2018) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Output* : Persentase capaian kinerja

Meliputi persentase pada program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi serta pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral batubara dan energi pada tahun 2017-2019.

*Input* : Perentase capaian anggaran

Meliputi persentase capaian anggaran pada program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi serta pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral batubara dan energi pada tahun 2017-2019.

Kriteria efisiensi menurut Gabriella *et al* (2019:356) ialah:

- a. Apabila hasil yang diperoleh kurang dari 100%(<100%) maka dinyatakan tidak efisien.
- b. Apabila hasil yang diperoleh sama dengan 100%(=100%) maka dinyatakan efisiensi berimbang.
- c. Apabila memperoleh hasil lebih dari 100%(>100%) maka dinyatakan sebagai efisien.

3. Rumus efektivitas menurut Mardiasmo (2018) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Realisasi kinerja

Meliputi realisasi kinerja pada program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi serta pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral batubara dan energi pada tahun 2017-2019.



*Output* : Target kinerja

Meliputi target kinerja pada program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi serta pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral dan batubara dan energi pada tahun 2017-2019.

Kriteria efektivitas menurut Mardiasmo (2018) sebagai berikut:

- a. Apabila hasil yang diperoleh kurang dari 100% ( $<100\%$ ) maka dinyatakan tidak efektif.
- b. Apabila hasil yang diperoleh sama dengan 100% ( $=100\%$ ) maka dinyatakan efektif berimbang.
- c. Apabila hasil yang diperoleh lebih dari 100% ( $>100\%$ ) maka dinyatakan efektif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Kantor Wilayah Energi dan Sumber Daya mineral di Provinsi Riau sebagai Instansi Vertikal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian terjadi penggabungan Dinas Pertambangan TK. I Riau dengan Kanwil Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau. Setelah itu dengan adanya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau beralih nama menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau adalah Salah Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola dana APBD. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Riau c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Riau dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tahun 2017 adalah tahun ke 3 (tiga) dalam RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga merupakan lanjutan dari tahun

kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau selain dari melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya lebih difokuskan pada pengembangan budaya, peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, peningkatan peran pemuda dan pembinaan prestasi. Reformasi birokrasi secara menyeluruh terus dilanjutkan dalam semua aspek pemerintahan daerah. Arah kebijakan difokuskan kepada penguatan jaringan infrastruktur, pengembangan budaya, peningkatan prestasi aparatur pemerintahan serta pemantapan pembangunan ekonomi berdaya saing.

Diantara infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau adalah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Untuk itu perlu dibuat suatu laporan kinerja menginformasikan capaian kinerja pada pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Riau .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dibuat sebagai perwujudan sasaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan dan Indikator Kinerja Utama (IKUI) Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

#### **4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas ESDM Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Batubara Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau**

##### **4.1.3.1. Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau**

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena divisi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan



arah, strategis yang jelas, mampu menjadi perekat serta menyatukan berbagai gagasan strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan bangsa dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan mengakar kepada visi Provinsi Riau Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020. Dinas ESDM Provinsi Riau telah menetapkan VISI organisasi adalah:

*“Terwujudnya Pembangunan Pertambangan dan Energi Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Masyarakat Riau Yang Sejahtera”*

#### 4.1.3.2. Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu dibuat perumusan misi secara jelas karena misi adalah merupakan pernyataan untuk menetapkan melalui penerapan strategi yang telah dipilih.

Didalam penentuan Misi Dinas ESDM Provinsi Riau, dinas ESDM Provinsi Riau telah menetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembinaan dan Pengembangan Listrik Perdesaan yang Mandiri Berbasis Energi Baru Terbarukan;
2. Mewujudkan Pengaturan dan Pengembangan Pengusahaan Mineral dan Batubara yang Standar, Kompetitif, Kopoten dan Transparan;
3. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Geologi, minyak dan Gas Bumi di Provinsi Riau;

4. Mewujudkan data dan informasi potensi pertambangan dan energi yang lengkap dan akurat;
5. Mewujudkan UPT Laboratorium dan Pengujian ESDM yang terakreditasi;
6. Mewujudkan pembinaan sumber daya manusia dibidang pertambangan dan energi secara professional.

#### 4.1.4 Stuktur Organisasi

Stuktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala UPT Laboratorium dan Pengujian ESDM, dan kelompok Jabatan Fungsional (Inspektur Ketenagalistrikan dan Inspektur Tambang).

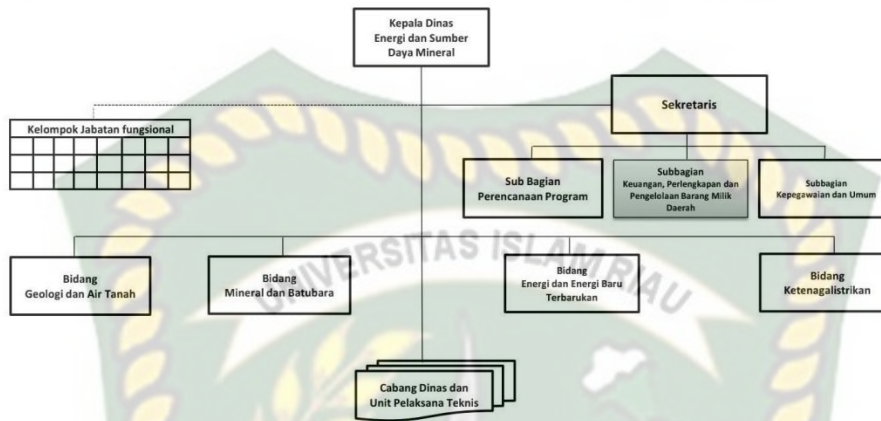
Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau secara rinci terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub bagian Perencanaan Program
  2. Sub bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah terdiri dari:
  1. Seksi Geologi;

2. Seksi Pengusahaan Air Tanah;
  3. Seksi Pengawasan dan Konservasi Air Tanah.
- d. Bidang Mineral dan Batubara terdiri dari:
1. Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
  2. Seksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  3. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan terdiri dari:
1. Seksi Energi;
  2. Seksi Energi Baru Terbarukan;
  3. Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  2. Seksi Pembinaan Pengusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan;
  3. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium dan Peralatan terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha UPT;
  2. Seksi Pengujian;
  3. Seksi Peralatan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Fungsional Tambang;
  2. Fungsional Ketenagalistrikan;

BAGAN ORGANISASI  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 48 TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2018



sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi

Kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis ialah jika bisa menghapus atau menyusutkan timbulnya dari biaya-biaya yang tidak diperlukan. Semakin rendah nilai dari rasio ekonomis, maka semakin bagus kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau didalam penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Rasio Ekonomis Tahun 2017- 2019 dari Dinas ESDM Provinsi Riau terlihat pada Tabel berikut:

Tingkat ekonomi menurut Nur zeni (2020:28) sebagai berikut:

$$Ekonomi = \frac{input}{nilai\ input} \times 100\%$$



Dengan kriteria menurut Purwiyanti (2019:194):

<100% maka dinyatakan sebagai ekonomis

=100% maka dinyatakan sebagai ekonomi berimbang

>100% maka dinyatakan sebagai tidak ekonomis

Berikut, contoh perhitungan ekonomi pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi baru dan Konservasi Energi Baru pada kegiatan pemantauan dan pembinaan penerapan kebijakan konservasi dan audit energi di provinsi Riau tahun 2017:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi} &= \frac{226.239.920}{257.120.000} \times 100\% \\ &= 88\% \end{aligned}$$

Keterangan :

*Input* : Realisasi anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi pada kegiatan pemantauan dan pembinaan penerapan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi baru dan Konservasi Energi Baru.

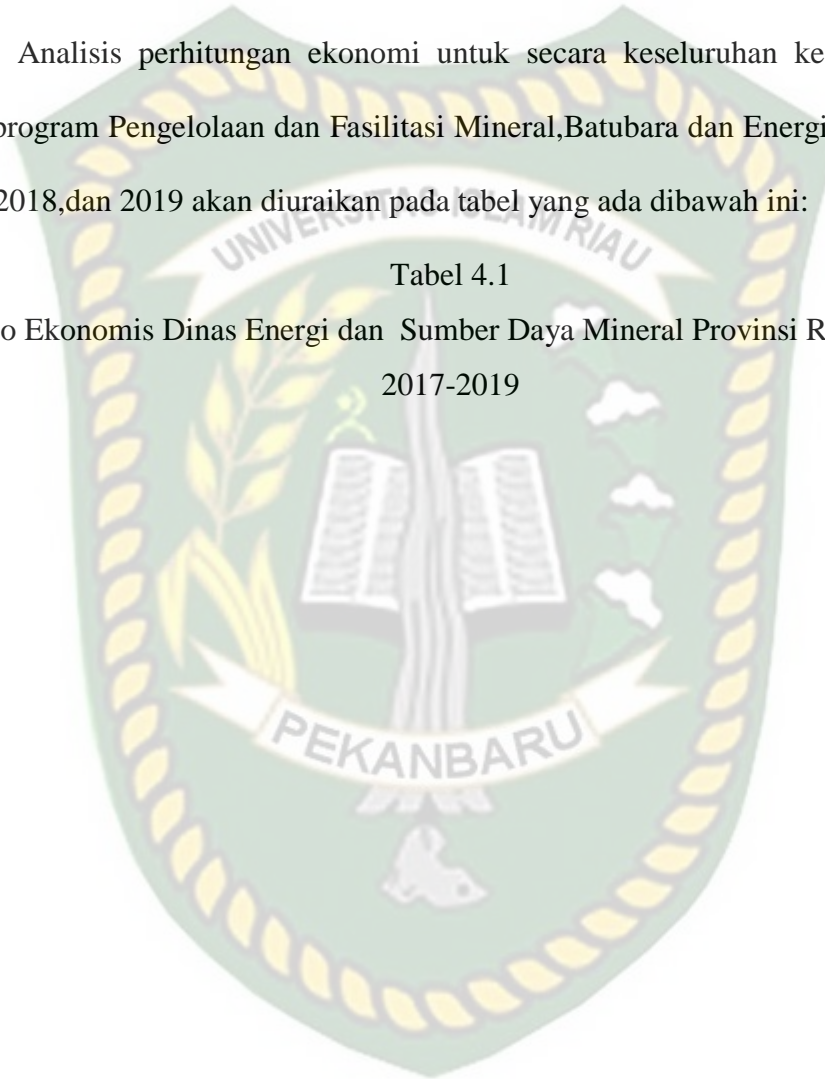
*Nilai input* : Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada kegiatan pemantauan dan pembinaan penerapan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi baru dan Konservasi Energi Baru.

Hasil dari perhitungan ekonomi pada kegiatan pemantauan dan pembinaan penerapan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau pada Program

Pembinaan dan Pengembangan Energi baru dan Konservasi Energi baru pada tahun 2017 memperoleh hasil sebesar 88%. Sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai ekonomis.

Analisis perhitungan ekonomi untuk secara keseluruhan kegiatan serta pada program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi pada tahun 2017, 2018, dan 2019 akan diuraikan pada tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 4.1  
Rasio Ekonomis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun  
2017-2019



Tabel 4.1 Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas ESDM tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Input	Nilai Input	Tingkat Ekonomis (%) = (1):(2)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi</b>	<b>15,413,770,866</b>	<b>17,964,420,040</b>	<b>86%</b>	<b>Ekonomis</b>
a.	Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Provinsi Riau	226,239,920	257,120,000	88%	Ekonomis
b.	Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	1,422,586,420	1,448,070,040	98%	Ekonomis
c.	Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau	117,037,100	142,626,000	82%	Ekonomis
d.	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH)	-	215,483,000	0%	Ekonomis
e.	Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya	358,707,296	500,000,000	72%	Ekonomis
f.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Provinsi Riau	731,416,730	2,500,000,000	29%	Ekonomis
g.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Riau	12,557,783,400	12,901,121,000	97%	Ekonomis
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi</b>	<b>2,093,362,007</b>	<b>2,508,659,525</b>	<b>83%</b>	<b>Ekonomis</b>
a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	76,200,300	125,000,000	61%	Ekonomis
b.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	95,393,000	100,000,000	95%	Ekonomis
c.	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan Air	99,475,000	114,820,000	87%	Ekonomis
d.	Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian	1,079,007,503	1,272,480,000	85%	Ekonomis
e.	Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	153,189,791	200,000,000	77%	Ekonomis
f.	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan elektronik	253,219,300	323,564,300	78%	Ekonomis
g.	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitas Dukungan Data dan Pemetaan	336,877,113	372,795,225	90%	Ekonomis

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.1 Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas ESDM tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Input	Nilai Input	Tingkat Ekonomis (%) = (1):(2)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi</b>	<b>565,704,000</b>	<b>48,087,577,800</b>	<b>1%</b>	<b>Ekonomis</b>
a.	Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Provinsi Riau	24,231,500	340,544,300	7%	Ekonomis
b.	Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	67,617,500	982,957,000	7%	Ekonomis
c.	Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan	60,221,000	610,683,300	10%	Ekonomis
d.	Survai Potensi Energi Terbarukan Se-Provinsi Riau	39,852,800	1,537,887,600	3%	Ekonomis
e.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Riau	197,197,500	34,597,754,000	1%	Ekonomis
f.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Provinsi Riau	176,583,700	10,017,751,600	2%	Ekonomis
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi</b>	<b>3,803,323,890</b>	<b>5,665,809,900</b>	<b>67%</b>	<b>Ekonomis</b>
a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	93,599,200	170,000,000	55%	Ekonomis
b.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	7,200,000	170,000,000	4%	Ekonomis
c.	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan Air	52,177,500	136,029,000	38%	Ekonomis
d.	Laboratorium Pengujian	3,297,750,790	4,169,386,700	79%	Ekonomis
e.	Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	63,892,600	187,943,400	34%	Ekonomis
f.	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan elektronik	119,654,600	293,907,000	41%	Ekonomis
g.	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi Dukungan Data dan Pemetaan	74,312,200	322,853,800	23%	Ekonomis
h.	Jasa Pengelolaan dan Operasional Laboratorium dan Peralatan ESDM	94,737,000	215,690,000	44%	Ekonomis

Sumber: Data Diolah



Tabel 4.1 Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas ESDM tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Input	Nilai Input	Tingkat Ekonomis (%) = (1):(2)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi</b>	<b>24,918,263,012</b>	<b>27,094,327,700</b>	<b>92%</b>	<b>Ekonomis</b>
a.	Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	8,358,333,200	9,032,759,000	93%	Ekonomis
b.	Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau	16,288,746,012	17,754,356,000	92%	Ekonomis
c.	Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya	271,183,800	307,212,700	88%	Ekonomis
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi</b>	<b>1,217,125,333</b>	<b>2,016,386,400</b>	<b>60%</b>	<b>Ekonomis</b>
a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	84,722,000	156,100,000	54%	Ekonomis
b.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	219,170,000	225,000,000	97%	Ekonomis
c.	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan Air	116,472,500	158,200,000	74%	Ekonomis
d.	Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	61,106,220	75,177,360	81%	Ekonomis
e.	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan elektronik	108,747,800	117,562,800	93%	Ekonomis
f.	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi Dukungan Data dan Pemetaan	107,832,387	129,141,000	83%	Ekonomis
g.	Jasa Pengelolaan dan Operasional Laboratorium dan Peralatan ESDM	247,567,000	250,000,000	99%	Ekonomis
h.	Pengembangan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium	208,310,426	303,578,000	69%	Ekonomis
i.	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi	63,197,000	601,627,240	11%	Ekonomis

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi, dan Progam Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral Batubara,dan Energi sudah ekonomis, dikarenakan berdasarkan hasil dari perhitungannya kurang dari 100% yang sudah dapat dikategorikan sebagai kategori yang ekonomis. Sehingga untuk indikator rasio ekonomis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sudah mencapai kinerja yang baik, karena dari tahun 2017-2019 (periode penelitian), telah berhasil mengelola penggunaan anggaran dengan baik.

#### 4.2.2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan menggunakan cara perbandingan antara output yang dihasilkan mengenai input yang digunakan. Proses dari suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efisien ialah apabila suatu produk atau hasil kinerja tertentu dapat dicapai melalui penggunaan sumber serta dana yang sekecil-mungkin Pengukuran suatu organisasi sektor publik dikatakan efisien apabila bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya dan menggunakan input yang sekecil-kecilnya.

Rumus Efisiensi menurut Mahsun (2018) ialah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Dengan kriteria menurut Gabriella *et al* (2019:356)

<100% maka dinyatakan sebagai tidak efisien

=100% maka dinyatakan sebagai efisien berimbang

>100% maka dinyatakan sebagai efisien

Berikut contoh cara perhitungan efisiensi pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi Baru pada kegiatan pemantauan dan pembinaan penerapan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau tahun 2017.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{100\%}{88\%} \times 100\% \\ &= 114\% \end{aligned}$$

Keterangan :

*Output* : Persentase capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada kegiatan pemantauan dan pembinaan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau tahun 2017.

*input* : Persentase capaian anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada kegiatan pemantauan dan pembinaan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau tahun 2017.

Hasil perhitungan efisiensi pada kegiatan pemantauan dan pembinaan kebijakan pemantauan dan pembinaan kebijakan konservasi dan audit di Provinsi Riau 2017 diperoleh sebesar 114%. Sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dikategorikan sebagai efisien.

Analisis dari perhitungan efisien untuk seluruh kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan energi baru an konservasi energi, serta pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral, batubara dan energi pada tahun 2017,2018,dan 2019 akan diuraikan kedalam tabel yang ada dibawah ini.

Tabel 4.2.

Rasio Efisiensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2017-2019

Tabel 4.2 Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas ESDM tahun 2017					
No	Uraian Kegiatan	Ouput (%)	Input (%)	Tingkat Efisiensi (%) = (1):(2)	Keterangan
1	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi</b>				
	a. Pemantauan dan Pembinaan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Provinsi Riau	100%	88%	114%	Efisien
	b. Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	100%	98%	102%	Efisien
	c. Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau	100%	82%	122%	Efisien
	d. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH)	100%	-	-	Tidak Efisien
	e. Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya	100%	72%	139%	Efisien
	f. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Provinsi Riau	100%	29%	345%	Efisien
	g. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Riau	100%	97%	103%	Efisien



<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi</b>					
	a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	100%	61%	164%	Efisien
	b	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	100%	95%	105%	Efisien
	c	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara,dan Air	100%	87%	115%	Efisien
	d	Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian	100%	85%	118%	Efisien
	e	Penysunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	77%	130%	Efisien
	f	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan elektronik	100%	78%	128%	Efisien
	g	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi Dukungan Data dan Pemetaan	100%	90%	111%	Efisien
Sumber: Data Diolah						

Berdasarkan tabel diatas Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dinyatakan bahwa enam (6) indikator efisien, satu(1) indikator yaitu pada indikator Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro tidak efisien berdasarkan kepada kategori yang telah ditentukan. Indikator yang dinyatakan tidak efisien

dikarenakan tidak memenuhinya syarat dari rasio efisiensi yaitu hasil rasionya dibawah dari 100%.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bawa kinerja keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2017 pada Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi memiliki tujuh indikator pada programnya, dari ketujuh indikator yang ada hasil dari rasio efisiensinya dapat disimpulkan bahwa indikator yang dimiliki pada program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral , Batubara dan Energi sudah termasuk dalam kategori yang efisien, dikarenakan hasil dari rasio efisiensi rata-rata diatas 100%.

Tabel 4.2.1

## Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2018

Tabel 4.2 Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas ESDM tahun 2018					
No	Uraian Kegiatan	Ouput (%)	Input (%)	Tingkat Efisiensi (%) = (1):(2)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi</b>				
	a. Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Provinsi Riau	81%	7%	114%	Efisien
	B Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	7%	7%	100%	Efisien Berimbang
	C Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya	3%	10%	30%	Tidak Efisien

	D	Survai Potensi Energi Terbarukan Se-Provinsi Riau	3%	2%	150%	Efisien
	E	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Riau	7%	1%	700%	Efisien
	F	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Provinsi Riau	7%	2%	350%	Efisien
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi</b>					
	a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	100%	55%	182%	Efisien
	B	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	5%	4%	125%	Efisien
	C	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan air	38%	38%	100%	Efisien Berimbang
	D	Laboratorium Pengujian	80%	79%	101%	Efisien
	E	Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	35%	34%	103%	Efisien
	F	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan Elektronik	42%	41%	102%	Efisien
	G	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi Dukungan Data dan Pemetaan	25%	23%	109%	Efisien
	H	Jasa Pengelolaan dan Operasioanal Laboratorium Dan Peralatan ESDM	45%	44%	102%	Efisien
Sumber: Data Diolah						

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi pada tahun 2018 miliki enam indikator, dari keenam indikator yang termasuk didalam kategori tidak efisiensi terdapat pada indikator Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya yaitu hasil dari rasionya dibawah dari 100% dan empat indikator lainnya termasuk kedalam kategori efisien dikarenakan hasil dari rasio efisiensinya diatas 100%, dan satu indikator termasuk kedalam efisiensi berimbang.

Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi pada tahun 2018 memiliki delapan indikator. Dari semua indikator tujuh yang termasuk kedalam efisiensi, dan Satu indikator termasuk kedalam efisien berimbang yaitu indikator Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan Air dimana hasil dari rasionya sama dengan 100%.

**Tabel 4.2.2**

Perhitungan tabel Efisiensi tahun 2019

Tabel 4.2.Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas ESDM tahun 2019					
No	Uraian Kegiatan	Input	Nilai Input	Tingkat Efisiensi (%) = (1):(2)	Keterangan
1	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi</b>				



	a.	Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	100	93	108%	Efisien
	B	Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau	100	92	109%	Efisien
	C	Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya	100	88	114%	Efisien
<b>2</b>		<b>Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi</b>				
	a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	100	54	185%	Efisien
	B	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	100	97	103%	Efisien
	C	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan Air	100	74	135%	Efisien
	D	Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	100	81	123%	Efisien
	E	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan elektronik	100	93	108%	Efisien

F	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi Dukungan Data dan Pemetaan	100	83	120%	Efisien
G	Jasa Pengelolaan dan Operasional Laboratorium dan Peralatan ESDM	100	99	101%	Efisien
H	Pengembangan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium	100	67	149%	Efisien
I	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi	100	10	1000%	Efisien
Sumber: Data Diolah					

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi tahun 2019 memiliki 3 indikator, dimana dari tiga indikator tersebut termasuk kedalam kategori yang efisien dimana hasil dari tiga indikator tersebut diatas dari 100%, Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi pada tahun 2019 memilki Sembilan indikator. Dari Sembilan indikator tersebut sudah termasuk kedalam indikator yang memiliki kategori efisien, dikarenakan hasil dari rasio efisiensinya diatas dari 100%.

#### 4.2.3. Rasio Efektivitas

Efektivitas dapat dikatakan efektif yaitu apabila pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang dihasilkan bisa memenuhi dari tujuan yang diharapkan. Perhitungan efektivitas ialah perbandingan antara *outcome* dan *input*.

Efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja berupa program ataupun kegiatan yang telah dijalankan telah mencapai tujuan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Dengan kriteria menurut Mardiasmo (2018):

<100% maka dinyatakan sebagai tidak efektif

=100% maka dinyatakan sebagai efektif berimbang

>100% maka dinyatakan sebagai efektif

Berikut, contoh dari perhitungan efektivitas Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Konservasi Energi Baru pada kegiatan pemantauan dan pembinaan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau pada tahun 2017.

$$\text{Efektivitas} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Realisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada kegiatan pemantauan dan pembinaan penerapan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau tahun 2017.

*Output* : Target kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada kegiatan pemantauan dan pembinaan penerapan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau tahun 2017.

Hasil perhitungan efektivitas pada kegiatan pemantauan dan pembinaan penerapan kebijakan konservasi dan audit energi di Provinsi Riau tahun 2017

diperoleh sebesar 100% sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai efektivitas berimbang.

Analisis perhitungan efektivitas pada seluruh kegiatan pada program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi serta pada Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi tahun 2017,2018, dan 2019 diuraikan pada tabel yang ada dibawah ini.

Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas ESDM tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Outcome (%)	output (%)	Tingkat Efektivitas (%) = (1):(2)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi</b>				
a.	Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Provinsi Riau	100	100	100%	Efektif Berimbang
b.	Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	100	100	100%	Efektif Berimbang
c.	Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau	100	100	100%	Efektif Berimbang



d	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH)	100	100	100%	Efektif Berimbang
e	Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya	100	100	100%	Efektif Berimbang
F	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Provinsi Riau	100	100	100%	Efektif Berimbang
g	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Riau	100	100	100%	Efektif Berimbang
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi</b>				
a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	100	100	100%	Efektif Berimbang
b	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	100	71	141%	Efektif
c	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan Air	100	100	100%	Efektif Berimbang
d	Persiapan Akreditasi Laboratorium	100	100	100%	Efektif Berimbang

	Pengujian				
e	Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	100%	Efektif Berimbang
F	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan elektronik	100	100	100%	Efektif Berimbang
g	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi Dukungan Data dan Pemetaan	100	100	100%	Efektif Berimbang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi tahun 2017 memiliki tujuh indikator dan hasil dari rasio efektivitasnya sama dengan 100%, dimana hasil sama dengan 100% tersebut termasuk kedalam kategori Efektif berimbang. Pada Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi tahun 2017 memiliki tujuh indikator. Satu dari indikator tersebut termasuk kedalam kategori efektivitas yaitu pada indikator Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium, enam dari indikator lainnya termasuk kedalam kategori efektif berimbang.

Tabel 2018

Tabel 4.3.1 Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas ESDM tahun 2018					
No	Uraian Kegiatan	Outcome (%)	output (%)	Tingkat Efektivitas (%) = (1):(2)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi</b>				
a.	Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Provinsi Riau	0%	54%	0%	Tidak Efektif
b.	Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	0%	59%	0%	Tidak Efektif
c.	Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya	0%	12%	0%	Tidak Efektif
d.	Survai Potensi Energi Terbarukan Se-Provinsi Riau	0%	10%	0%	Tidak Efektif
e.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Riau	0%	6%	0%	Tidak Efektif
f.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Provinsi Riau	0%	343%	0%	Tidak Efektif

<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi</b>					
	a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	25%	100%	25%	Tidak Efektif
	b.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	21%	100%	21%	Tidak Efektif
	c.	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan Air	8%	30%	27%	Tidak Efektif
	d.	Laboratorium Pengujian	60%	60%	100%	Efektif Berimbang
	e.	Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	1%	0%	Tidak Efektif
	f.	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan Elektronik	3%	7%	43%	Tidak Efektif
	g.	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilirasi Dukungan Data dan Pemetaan	6%	12%	50%	Tidak Efektif
	h.	Jasa Pengelolaan dan Operasioanal Laboratorium Dan Peralatan ESDM	40%	100%	40%	Tidak Efektif
Sumber: Data Diolah						



Berdasarkan tabel diatas pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi tahun 2018 serta pada Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi tahun 2018 tidak ada yang memenuhi standar dari rasio efektivitas, dimana pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi memiliki enam indikator dan pada Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi memiliki delapan indikator. Hasil dari kedua program tersebut tidak dapat dikatakan efektivitas dikarenakan syarat dikatakan efektif harus diatas 100%. Tetapi pada Indikator Laboratorium Pengujian termasuk kedalam rasio efektivitas berimbang.

**Tabel 4.3.2 Rasio Efektivitas tahun 2019**

No	Uraian Kegiatan	Outcome (%)	output (%)	Tingkat Efektivitas (%) = (1):(2)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi</b>				
a.	Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau	673	673	100%	Efektif Berimbang
B	Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau	4	4	100%	Efektif Berimbang
C	Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/ Bio Mass/ Angin dan Energi Terbarukan Lainnya	5	5	100%	Efektif Berimbang

2	<b>Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi</b>					Efektif Berimbang
a.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi	4	4	100%		Efektif Berimbang
B	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium	17	17	100%		Efektif Berimbang
C	Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara, dan Air	4	4	100%		Efektif Berimbang
D	Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	100%		Efektif Berimbang
E	Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan elektronik	2	2	100%		Efektif Berimbang
F	Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitas Dukungan Data dan Pemetaan	12	12	100%		Efektif Berimbang
G	Jasa Pengelolaan dan Operasional Laboratorium dan Peralatan ESDM	7	7	100%		Efektif Berimbang
H	Pengembangan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium	1	1	100%		Efektif Berimbang

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

I	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi	-	8	0%	Tidak Efektif
---	---	---	---	----	---------------

Sumber: Data Diolah

Hasil dari perhitungan dari Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi tahun 2018 memiliki tiga indikator yang dimana hasil dari rasio efektivitas dari tiga indikator tersebut sama dengan seratus atau efektif berimbang. Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi 2018 memiliki Sembilan indikator yang mana hasil dari rasio efektivitasnya dari Sembilan indikator tersebut satu indikator yang hasilnya pada indikator Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi tidak efektif, dan delapan indikator hasilnya sama dengan seratus atau efektif berimbang.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Pembahasan Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Tahun 2017-2019

Hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio ekonomi pada tahun 2017 dengan menggunakan metode value for money pada program kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sudah termasuk kedalam kategori yang ekonomis, hal ini menunjukkan bahwa anggaran serta realisasi LAKIP 2017 dikatakan sebagai ekonomis. Pada tahun 2018 program kerja juga sudah termasuk kedalam kategori yang ekonomis. Perhitungan ekonomis pada tahun 2019 LAKIP program kinerja juga sudah termasuk kedalam kategori yang ekonomis. Dari data yang sudah diterima dan diolah Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Riau telah mampu menggunakan anggaran dengan hemat dan bisa katakan

ekonomis. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan ekonomis kegiatannya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yaitu kemampuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam mengelola keuangannya kemudian menghasilkan sebuah kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat

#### **4.3.2. Pembahasan Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2017-2019**

Pengukuran efisiensi pada LAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada tahun 2017, *value for money* pada program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi dari tujuh indikator hanya satu indikator saja yang memasuki kriteria tidak efisien. Indikator yang termasuk pada kategori yang tidak efisien ialah pengadaan pembangkit listrik tenaga micro hydro, indikator pembangkit listrik tenaga micro hydro tidak efisien dikarenakan gagalnya lelang dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan. Sisa dari indikator tersebut termasuk kedalam kategori yang efisien. pada tahun 2017 pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral, batubara dan energi memiliki tujuh indikator kinerja, dari ketujuh indikator kerja tersebut sudah memenuhi syarat efisien. Pada tahun 2018 perhitungan efisiensi menunjukkan bahwa program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi memiliki enam indikator kinerja. Dari enam indikator kerja hanya satu indikator kerja yang tidak memenuhi syarat efisien yaitu pada indikator pengadaan pembangkit tenaga bio gas/ bio mass/ angin dari energi terbarukan lainnya. Pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral, batubara dan energi 2018 dari delapan indikator kerja hanya



satu indikator yang efisien berimbang yaitu pada indikator pengujian sampel-sampel batuan, mineral, batubara, dan air. Pada program kerja tahun 2019 perhitungan efisiensi pada program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi memiliki tiga indikator kerja, dari tiga indikator kerja tersebut memenuhi syarat efisiensi. Pada program kerja Pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral, batubara dan energi 2019 memiliki Sembilan indikator kerja. Dari Sembilan indikator kerja dilakukan perhitungan efisiensi sudah memiliki syarat efisiensi.

#### **4.3.3 Pembahasan Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2017-2019**

Pada hasil perhitungan efektivitas LAKIP pada Dias Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2017 pada program kerja program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi memiliki tujuh indikator kerja, dari tujuh indikator kerja hasil perhitungan rasio efektivitasnya menunjukkan pada efektif berimbang. Berbeda dengan program kerja Pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral, batubara dan energi 2017 memiliki tujuh indikator kerja. Dari tujuh indikator kerja tersebut, satu indikator yang hasilnya efektif yaitu pada indikator Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium, selebihnya menunjukkan efektif berimbang. Pada tahun 2018 pada program kerja program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi memiliki enam indikator kerja hasil perhitungan efektivitasnya tidak efektif. Pada program pengelolaan dan fasilitasi mineral, batubara dan energi 2018 memiliki delapan indikator kerja, dari delapan indikator kerja satu yang hasilnya efektif berimbang yaitu pada indikator Laboratorium Pengujian. Pada tahun 2019

program kerja program pembinaan dan pengembangan energi baru dan konservasi energi memiliki tiga indikator kerja, hasil dari tiga indikator kerja tersebut menunjukkan hasil efektif berimbang. Pada program kerja program pengelolaan dan fasilitasi mineral, batubara dan energi 2019 memiliki Sembilan indikator kerja. Hasil dari Sembilan indikator kerja tersebut hanya satu yang hasilnya efektif berimbang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis pada Kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menunjukkan kinerja pemerintah pada tahun 2017-2019 bahwa sudah termasuk kedalam rasio ekonomis. Sehingga untuk indikator rasio ekonomis pada tahun 2017-2019 (periode penelitian), telah berhasil mengelola/ berhemat didalam penggunaan anggaran dengan baik.
2. Rasio efisiensi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sudah efisien. Dimana pada tahun 2017-2019 (periode penelitian) indikator pada setiap program nya menunjukkan hasil rasio yang diatas seratus persen. Karena apabila rasio kurang dari seratus persen maka dapat dikatakan tidak efisiensi. Secara keseluruhan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah memenuhi syarat dari efisiensi.
3. Rasio efektivitas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menunjukkan kinerja pemerintah pada tahun 2017-2019 hasil dari rasio yang diperoleh menunjukkan hasil tahun 2017 rata-rata 100%, 2018 rata-rata 0%, 2019 rata-rata 100% yang mana hasil dari rasio tersebut efektif berimbang dan tidak efektif.

## 5.2 Saran

1. Untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dapat menganalisis kembali pada program kegiatannya supaya bisa memenuhi Konsep *value for money*. Hasil dari perhitungan Rasio Ekonomis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sudah baik.
2. Perlu dilakukannya peningkatan terhadap *output* dari *input* dari Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi dan Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi. Dalam pembinaan pengembangan energi baru dan konsevasi energi dan mengelola fasilitasi mineral, batubara, dan energi karena tingkat efisiensi sangat bergantung kepada besarnya atau kecilnya *output* dari program/kegiatan yang dihasilkan. Jika *output* yang dihasilkan semakin besar maka tingkat efisiensi juga semakin meningkat. Sehingga target pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dapat tercapai
3. Perlu dilakukannya peningkatan terhadap realisasi kinerja dari program atau kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konsevasi Energi dan Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi Dalam pembinaan pengembangan energi baru dan konsevasi energi dan mengelola fasilitasi mineral, batubara, dan energi karena tingkat efektifitas kinerja sangat bergantung kepada besarnya realisasi kinerja yang dihasilkan. Jika realisasi kinerja yang dihasilkan semakin besar maka tingkat



efektivitas juga semakin meningkat. Sehingga target dan tujuan kinerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dapat tercapai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhir, T. (2011). *Analisis Value for Money Pada Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Semarang*.
- Akuntansi, Jurnal, & Keuangan, D. A. N. (2018). *ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE ( STUDI KASUS PADA DPKAD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2014-2016 )* Indrayani@unimal.ac.id. 6, 1–10.
- Akuntansi, Jurusan, & Ratulangi, U. S. (2017). 3 1,2,3. 12(2), 782–791.
- Cabrera Marino, K. M. (2017). *Инновационные подходы к обеспечению качества в здравоохранении*No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 6, 5–9.
- Hamid, A., & Lamuda, I. (2019). *Evaluation of Financial Performance Through Approach To Value for Money Pendekatan Value for Money*. *Gorontalo Accounting Journal*, 2, 31–41.
- Harindra, I. (n.d.). *ANALISIS PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH*.
- Harly, K., & Afriyenty, M. (2017). *Analisis kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014-2016)*. *Wra*, 5(2), 1065.
- Irmawati, & Rinaldy, R. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015*. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1), 93–99.
- Jhon Wiley & Sons, I. (2017a). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (Dedy A. Halim (ed.); Edisi 6). salemba empat.
- Jhon Wiley & Sons, I. (2017b). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (Dedy A. Halim

(ed.); Edisi 6 bu). salemba empat.

Kristanti, O. I. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value for Money*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 134.

Kurrohman, T. (2013). *Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1–11.

Liando, H. S., Paul, D., Saerang, E., & Elim, I. (2014). *3 1,2,3*. 2(3), 1686–1694.

Pancanugraha, I. (2015). *Value for Money Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Poso Tahun 2013-2014*. 5, 20–27.

Peningkatan, S., Pegawai, K., Unit, P., Kendaraan, P., Perhubungan, D., Informatika, K. D. A. N., Sleman, K., Widodo, A., Manajemen, P. M., & Wiwaha, S. W. (2016). *IE Ja W ng id an ya P Wi la w gi a at ha Ja W ng id an ya P Wi la w gi a at ha*. 154115377, 1–95.

Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J., Polii, I. R. A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (n.d.). *UTARA BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF THE NORTH SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT BASED ON THE CONCEPT OF VALUE FOR MONEY* *Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 781 -788*. 8(4), 781–788.

Purnomo, A., & Wirawati, N. (2015). *Penilaian Kinerja Berbasis Value for Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(1), 252–268.

Purwiyanti, D. (2017). *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigrasi Donggala Kodi*. *Katalogis*, 5(3), 190–200.

Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P. (2019). *Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmu Dan Riset* .... <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2719>

- Setiawan, A. B., & Gustia, W. (2016). *Analisis Value for Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor*. *Jurnal Akunida*, 2(2), 14–26. <https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/1395>
- Suryantari, P. D., & Ulupui, I. G. K. A. (2016). *Kinerja Dinas Pariwisata Bali Berdasarkan Konsep Value for Money*. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1635–1666.
- Wigrhayani, N. N. S. W. (2019). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585. Pengaruh Kebijakan Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba*, 8, 22.